

PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP BELANJA PEMERINTAH PROVINSI ACEH

Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim
Email: sonnyikhsan@yahoo.com

Diterima 20 Desember 2018/Disetujui 23 Desember 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdampak terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber data-data dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear sederhana. Analisis regresi linear digunakan untuk membuktikan Pengaruh Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Aceh. Hasil penelitian diperoleh bahwa anggaran adalah stabilisator ekonomi bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskalnya. Setiap peningkatan pengalokasian APBD sebesar 1% akan berdampak terhadap peningkatan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh sebesar 4,375% pertahun. Pengalokasian APBD untuk berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan berdampak terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Aceh sebesar 89,10%. Hasil uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5,559 > 1,883$ yang berarti bahwa pengalokasian APBD pada pembangunan kegiatan produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Aceh.

Kata kunci: *APBD, Belanja Pemerintah*

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara hendaknya dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara berkesinambungan. Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Untuk mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada seluruh sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional, maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat, yang dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan dituang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang jumlahnya sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat regional, yang keseluruhan dari dana tersebut disusun dalam laporan APBD serta merupakan dasar pengelola keuangan daerah dalam tahun tertentu yang berisi pendapatan dan pembiayaan dana pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Aceh menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah sebagai instrumen

kebijakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang dibebankan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya yaitu berupa laporan realisasi APBD untuk dinilai dan dievaluasi apakah pemerintah daerah berhasil mencapai tujuannya atau tidak dalam mensejahterakan masyarakatnya. Bagian pendapatan dapat dilihat dari upaya pemerintah memperoleh dana dari sumber pendapatan yang sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi daerah yang dibayar oleh masyarakat, sedangkan bagian belanja dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam mengalokasikan pendapatan yang diperolehnya untuk membiayai program yang menjadi prioritas pemerintah.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh bertujuan untuk pemerataan hasil pembangunan. Namun, kenyataannya banyak terjadi penyimpangan sehingga hasil pembangunan tersebut belum dinikmati oleh masyarakat secara merata. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai aspek dan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi regional. Permasalahan ini terjadi karena dalam pengelolaan APBD oleh pemerintah kurang efektif serta pengalokasiannya kurang tepat sasaran untuk menciptakan pembangunan pada bidang produktif. Besarnya APBD di Provinsi Aceh terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Aceh Tahun 2007-2016

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pembiayaan Daerah	APBD
2007	3.012.478.244.185,13	3.137.627.210.432,87	3.266.881.087.852,40	9.416.986.542.470,40
2008	6.991.764.844.913,10	5.715.623.665.304,00	2.819.239.109.587,79	15.526.627.619.805,89
2009	6.042.467.779.063,03	7.642.847.005.194,25	3.443.367.904.706,89	17.128.682.688.964,17
2010	6.992.253.904.018,37	7.528.516.368.216,00	1.842.988.678.575,67	16.363.758.950.810,04
2011	7.610.320.147.037,19	7.374.625.289.279,00	1.273.145.751.093,61	16.258.091.187.410,30
2012	9.180.143.048.473,63	8.757.319.943.552,18	1.508.840.608.851,30	19.446.303.600.877,11
2013	10.671.826.520.445,50	11.220.427.555.133,80	1.948.740.094.046,82	23.840.994.169.626,12
2014	11.606.175.260.015,30	12.045.847.341.692,80	1.356.465.864.694,80	25.008.488.466.402,90
2015	11.680.376.915.213,00	12.135.635.484.500,70	741.935.123.460,09	24.557.947.523.173,79
2016	12.364.563.976.147,30	12.119.713.196.647,10	217.881.122.545,44	24.702.158.295.339,84

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Aceh, 2017

Pemerintah Provinsi Aceh sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tujuan dari suatu daerah untuk melakukan pembangunan adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Pada dasarnya pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan yang membuat sebuah keadaan dimasa sekarang diharapkan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD. Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap pemerintah daerah perlu menyusun prioritas belanja modal dan perencanaan yang baik sehingga dapat menjadi kunci untuk menyalasi kendala yang dihadapi. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam merencanakan alokasi belanja pada APBD agar lebih mengutamakan pihak untuk kepentingan publik (belanja langsung) daripada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung).

Pengalokasikan komponen belanja langsung yang berupa belanja modal, pemerintah harus mengarahkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonominya sehingga pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Satuan kerja perangkat daerah kemudian menyusun belanja modal sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Belanja modal yang diterima daerah yang mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum mengindikasikan bahwa pemenuhan atas keterbatasan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah itu sendiri. Banyak pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang harus dilakukan khususnya di aceh untuk membantu proses percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah yaitu dengan pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah dan juga pembiayaan daerah secara efektif dan efisien terhadap belanja modal daerah. Sumber Pendapatan dan pembiayaan daerah itu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting masyarakat daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Namun yang terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan diharapkan mampu menciptakan produktivitas perekonomian dimasyarakat, karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Seharusnya pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melakukan perubahan komposisi belanja, karena selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber data-data dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear sederhana. Analisis regresi linear digunakan untuk membuktikan Pengaruh Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Aceh. Hubungan antar variabel tersebut digambarkan dengan persamaan sebagai

berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

b = Slope atau Koefisien Regresi

X_1 = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh

Untuk menjelaskan dampak dari variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*) atau dampak APBD terhadap Belanja Pemerintah Aceh dapat dilihat dari hasil pengolahan data, yaitu:

Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil pengujian estimasi regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Regresi Linear Sederhana

Variabel	B	Standar Error	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Kostanta	13442,918	15622,497	0,860	1,833	0,415
APBD	4,375	0,000	5,559	1,833	0,001
Koefisien Korelasi (R)		0,891			
Koefisien Determinasi (R ²)		0,794			
Adjusted R Square (R ²)		0,769			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2018

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diperoleh persamaan akhir estimasi regresi linear sederhana yaitu $Y = 13442,918 + 4,375 X$. Maka, dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Kostanta sebesar 13442,918, apabila diasumsikan tidak adanya perubahan APBD, maka Belanja Pemerintah Provinsi Aceh secara rata-rata adalah sebesar Rp.13442,918 Milyar pertahun;
2. Koefisien regresi dari APBD (variabel X) sebesar 4,375, artinya apabila APBD (variabel X) mengalami peningkatan sebesar 1%, akan berdampak terhadap peningkatan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (Variabel Y) secara rata-rata yaitu sebesar 4,375% pertahun;
3. Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,891 menunjukkan bahwa APBD (variabel X) berdampak sebesar 89,10% terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (Variabel Y);
4. Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,794 artinya bahwa sebesar 79,40% perubahan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (variabel Y) merupakan dampak dari APBD (X),

sedangkan selebihnya yaitu sebesar 20,60% dijelaskan oleh variabel atau indikator lain diluar penelitian ini; dan

5. Koefisien Adjusted R Square sebesar 0,769 menunjukan bahwa sekitar 76,90% variasi dari Belanja Pemerintah Provinsi Aceh (Variabel Y), merupakan dampak dari APBD (variabel X), sedangkan selebihnya yaitu sebesar 23,10% dipengaruhi oleh variabel atau indikator lain diluar penelitian ini.

Uji Signifikan Koefisien Regresi (Uji t)

Uji t atau uji searah (uji parsial) digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t juga digunakan untuk menguji apakah model regresi antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) berdampak secara signifikan atau tidak signifikan. Maka, hasil analisis *output program Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 16:00* diperoleh nilai t_{hitung} untuk APBD (variabel X) sebesar 5,559 dan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5% sebesar 1,883. Maka, disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5,559 > 1,883$, dan hasil pengujian menerima Hipotesis alternatif (H_a) dan menolak Hipotesis nol (H_0), yang berarti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (variabel X) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja di Provinsi Aceh (Variabel Y).

Pembahasan

Pemberlakuan otonomi daerah yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat, merupakan peranan keuangan di Provinsi Aceh yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga, keuangan daerah APBD akan memberikan gambaran secara statistik mengenai perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan perekonomian dianggap relatif besar, dikarenakan Pemerintah Provinsi Aceh memiliki peranan dalam mengatur, mengelola dan mengalokasikan sumber dana dan pengeluaran. Besar kecilnya pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di Provinsi Aceh akan menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh mengenai anggaran pembangunan sektor ekonomi dituangkan dalam APBD. Kebijakan Pemerintah juga diperlukan dalam hal pendistribusian anggaran, untuk dapat terciptanya sumber pendapatan baru bagi daerah. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pembangunan, karena pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan melalui pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor ekonomi lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan rupiah dalam periode tertentu yaitu selama satu tahun. Melalui APBD dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran merupakan suatu laporan yang memuat penerimaan dan pembelanjaan daerah, serta ditetapkan target

yang akan dicapai pemerintah dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan pemerintah daerah dituangkan dalam anggaran tersebut. Setiap tahunnya, proses penyusunan anggaran menjadi isu sorotan utama masyarakat, dikarenakan APBD selalu menjadi indikator perekonomian daerah selama tahun berikutnya. Sehingga, APBD menjadi dasar, apakah masyarakat akan semakin sejahtera atau tidak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengetahuan proses penyusunan APBD yang efektif dan efisien.

Penentuan besaran APBD setiap tahun akan menentukan keberhasilan pembangunan di Provinsi Aceh. Realisasi APBD merupakan representasi pengeluaran pemerintah daerah dan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian Provinsi Aceh yang terlihat dari adanya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil pengolahan data bahwa setiap peningkatan APBD sebesar 1% yang dialokasikan pada pembangunan kegiatan produktif akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh secara rata-rata yaitu sebesar 4,375% pertahun.

Pembelanjaan pemerintah untuk kegiatan pembangunan di Provinsi Aceh akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi regional. Jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah dalam realisasi APBD, semakin besar belanja pemerintah, maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi regional. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil pengolahan data bahwa APBD berdampak sebesar 89,10% terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Aceh tidak bisa terlepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah, sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah atau APBD menjadi relevan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD seharusnya dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan dicapainya tujuan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja pemerintah Provinsi Aceh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; 2) APBD merupakan representasi pengeluaran pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian, setiap peningkatan pengalokasian APBD sebesar 1% akan berdampak terhadap peningkatan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh sebesar 4,375% pertahun; 3) pengalokasian APBD untuk berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan berdampak terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Aceh sebesar 89,10%; dan 4) hasil uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5,559 > 1,883$ yang berarti bahwa pengalokasian APBD pada pembangunan kegiatan produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Aceh.

REFERENSI

Azhari, A. Samudra. 2013. *Manajemen dan Reformasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia

Indonesia.

Darwanto, Yustikasari. 2013. *Konsep Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gesindo.

Halim, Abdul. 2014. *Pengeluaran Pembangunan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Balai Pustaka.
Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jakarta: Lembaran Negara.

Saragih, Bungaran. 2013. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2013. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.